

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah merupakan salah satu unsur yang berperan penting dalam mencapai tujuan suatu negara. Proses pencapaian tujuan bagi setiap negara pada dasarnya sama walaupun berbeda dalam rumusannya. Tujuan Negara Republik Indonesia sendiri tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke IV yaitu:

“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”¹.

Tujuan negara sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke IV, tidaklah mudah siwujudkan sebagaimana diharapkan permasalahan senantiasa hadir ditengah masyarakat Indonesia salah satunya permasalahan sosial yaitu kemiskinan. Akan tetapi permasalahan kemiskinan bukan hanya terjadi di Indonesia, ini juga terjadi di negara-negara berkembang lainnya. Kemiskinan sendiri adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.

Peran pemerintah daerah dibutuhkan karena Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut terdiri atas daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada dasarnya kemiskinan secara umum merupakan hal yang sangat sulit diatasi, apalagi bagi negara berkembang. Kemiskinan menjadi kata yang sangat menakutkan karena semua orang pasti tidak mau menjadi miskin. Critianto Leasiwal menyebutkan bahwa Kemiskinan pada negara berkembang merupakan masalah yang cukup rumit meskipun beberapa negara berkembang telah berhasil melaksanakan pembangunan dalam hal produksi dan pendapatan nasional. Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah juga merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara atau daerah tersebut.²

Sungkuwo Edy Mulyono mengatakan bahwa, “Pada umumnya kemiskinan itu terjadi karena berbagai hal, salah satu diantaranya disebabkan dari karakter atau tipologi orang miskin”. Kemiskinan juga memunculkan masalah baru seperti kebodohan, pengangguran, kelaparan, kesenjangan sosial, kesehatan, serta kriminalitas. Dampak lain yang ditimbulkan oleh kemiskinan bukan hanya masalah pemenuhan kebutuhan pokok semata, tetapi pendidikan juga ikut terabaikan.³

Hal ini dapat dilihat dengan rendahnya tingkat pendidikan yang semakin meningkat, sehingga menyebabkan masyarakat miskin tidak mampu melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan menyebabkan terjadinya pengangguran dan kemiskinan.

Kemiskinan ekstrem adalah sejenis kemiskinan dimana kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Indikator Kemiskinan Ekstrem adalah penduduk yang berpendapatan di bawah US\$1,91 PPP (*Purchasing Power Parity*) per kapita per hari (setara Rp. 9.089 per hari). PPP didefinisikan sebagai jumlah unit mata uang yang diperlukan untuk membeli barang dan jasa yang umum yang dapat dibeli oleh satu unit mata uang umum/referensi.⁴

² Christianto Leasiwal, *Determinan Dan Karakteristik Kemiskinan Di Provinsi Maluku*. Universitas Pattimura. Vol 7, No 2, 2017, 1.

³ Sungkuwo Edy Mulyono, *Kemiskinan Dan Pemberdayaan*. (Yogyakarta, 2017), 12.

⁴ Robert Lawang, *Buku Materi Kemiskinan*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2012), 19.

Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem, pemerintah Indonesia telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ditingkat nasional hingga daerah.⁵ Melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah sehingga diatur dalam Instruksi Presiden (INPRES) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Instruksi Presiden tersebut mengatur tentang keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Keterpaduan dan sinergi program merupakan hal yang penting dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Hal ini karena kemiskinan ekstrem merupakan masalah yang kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu kementerian/lembaga atau pemerintah daerah saja.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy merilis pembaruan capaian angka penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Indonesia untuk periode semester I tahun 2024. Angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Indonesia terus mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,03%. Angka ini telah mengalami penurunan sebesar 0,33% yang mana semula pada bulan Maret 2023 angka kemiskinan sebesar 9,36%. Angka kemiskinan 9,03% ini merupakan angka terendah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Sejalan dengan angka kemiskinan, kondisi kemiskinan ekstrem di Indonesia juga terus mengalami penurunan. Persentase

⁵ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. “Pedoman Umum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan”, <https://www.kemenkopmk.go.id/> (diakses tanggal 20 Februari 2025).

penduduk miskin ekstrem Indonesia pada Maret 2024 sebesar 0,83%, berhasil turun 0,29% poin terhadap Maret 2023 sebesar 1,12%.⁶

Tabel 1.1 Data Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Majalengka 2021-2024.

No.	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penduduk Miskin	151.140	147.120	138.740	134.580
2.	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)	466,813	483,319	520,713	547,912
3.	Presentase Penduduk Miskin	12.33	11.49	11.21	10.82
4.	Jumlah Kemiskinan Ekstrem ribu (jiwa)	43.83	24.13	10.64	14.59
5.	Presentase Penduduk Miskin Ekstrem	3.58	1.96	0.86	1.18
6.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)%	2.44	1.55	1.34	1.76
7.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)%	0.77	0.36	0.26	0.45

Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Majalengka mencapai 1.18% pada tahun 2024. Sedangkan ditahun sebelumnya yakni 2023, jumlah penduduk miskin ekstrem 0.86%. Kenaikan presentase tersebut menjadi tantangan yang besar sehingga memerlukan kerjasama dan koordinasi yang lebih kuat antara Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menurunkan kembali jumlah presentase dan memberantasnya hingga 0.⁷

⁶ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, "Pemerintah Kejar Target Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia", <https://www.kemenkopmk.go.id/> (diakses tanggal 20 Februari 2025).

⁷ Hasil wawancara dengan Pak Imam selaku anggota Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Majalengka pada tanggal 24 Januari 2025.

Tabel 1.2 Data Kemiskinan Kabupaten Sumedang 2021-2023.

No.	Indikator Kemiskinan	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Tingkat Kemiskinan	10,71	10,14	9,36
2.	Jumlah Penduduk (ribu)	31,71	36,82	6,37
3.	Presentase Kemiskinan Ekstrem	2,69	3,11	0,53

Angka Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Sumedang pada tahun 2021 sebesar 2,69% dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 3,11%. Salah satu penyebab kenaikan dari angka kemiskinan ekstrem ini adalah program penanggulangan kemiskinan yang menasar langsung kepada masyarakat miskin ekstrem sangat terbatas. Pada tahun 2023 pemerintah Kabupaten Sumedang menetapkan sasaran miskin ekstrem berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, menjadi fokus prioritas sasaran program penanggulangan kemiskinan baik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten, pemerintah Desa dan pihak non pemerintah secara kolaboratif dan terintegrasi. Untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan secara kolaboratif dan terintegrasi, maka data P3KE ditanam di e-office desa. Selain program-program yang dilaksanakan Perangkat Daerah, pada tahun 2023 pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan optimalisasi program sakip desa (Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Desa) dengan fokus sasaran miskin ekstrem dan didukung dengan program KKN GRMD (Gotong Royong Membangun Desa) serta di akselerasi dengan program Pasang Sangkur (Pamarentah Sareng Warga Ngawangun Silaturahmi Nguatkeun Kamandirian Lembur).⁸

Ditingkat daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran penting dalam implementasi program-program penanggulangan kemiskinan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertanggung jawab

⁸ Pemerintah Kabupaten Sumedang, "Sumedang Targetkan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 0%", <https://sumedangkab.go.id/> (diakses tanggal 20 Februari 2025).

untuk melaksanakan kebijakan dan program yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.⁹ Namun, dalam praktiknya, koordinasi antara Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengatasi kemiskinan ekstrem seringkali menghadapi berbagai tantangan. Masih terdapat kesenjangan antara perencanaan dan implementasi program penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sinergi antara Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan terbatasnya kapasitas kelembagaan.

Mengingat kompleksitas permasalahan kemiskinan ekstrem dan pentingnya koordinasi antar lembaga dalam mengatasinya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kerja antara Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana mekanisme koordinasi yang diterapkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merencanakan program berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Majalengka, faktor apa yang menghambat efektivitas hubungan kerja antar lembaga dan sejauh mana peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam memperkuat kapasitas kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Majalengka.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengkaji tentang Hubungan Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ekstrem. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Studi Kebijakan Publik, dengan topik kajian Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. Metode yang akan digunakan oleh peneliti yaitu metode kualitatif, yang merupakan sebuah metode penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena dengan cara mengamati dan menganalisis data secara mendalam.

Maka dari itu, masalah yang dapat diidentifikasi antara lain:

- a. Mekanisme koordinasi yang diterapkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Majalengka.
- b. Faktor yang menghambat efektivitas hubungan kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Majalengka.
- c. Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam memperkuat kapasitas kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Majalengka.

2. Pembatasan Masalah

Agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas, peneliti akan membatasi masalah guna memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Peneliti akan melakukan studi lapangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana mekanisme koordinasi yang diterapkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan Instruksi Presiden

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Majalengka?

- b. Apa saja faktor yang menghambat efektivitas hubungan kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Majalengka?
- c. Bagaimana Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam memperkuat kapasitas kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme koordinasi yang diterapkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menghambat efektivitas hubungan kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Majalengka.
3. Untuk mengetahui bagaimana peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam memperkuat kapasitas kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Majalengka.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk menunjang proses belajar dan mengajar. Mencakup penyediaan dasar atau kerangka kerja untuk penelitian dimasa depan, penelitian lanjutan di Perguruan Tinggi, memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan wawasan, serta dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian/studi selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi solusi konkret untuk masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Juga diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai Hubungan Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Majalengka Berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemerintah daerah agar menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.

E. Literatur Review/Penelitian Terdahulu

- 1) Nuni Nuranisa dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Palopo”, 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo dan untuk mendeskripsikan kendala dan upaya yang dilakukan pemerintah Kota Palopo dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa peran pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Palopo ada 3, yaitu: 1) sebagai regulator, yang berarti pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat fakir miskin dengan memenuhi syarat tertentu yang telah ditetapkan; 2) sebagai dinamisator dalam bentuk pemberian binaan atau bimbingan kepada berbagai pihak dalam rangka menanggulangi kemiskinan; dan 3) sebagai fasilitator, artinya pemerintah berperan sebagai perpanjangan lidah masyarakat fakir miskin yang menerima bantuan tetapi mengalami kendala seperti tidak terdata dan lain sebagainya. Kendala yang dihadapi terkait dengan masalah data yang valid sehingga berimplikasi pada penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, dan juga keterbatasan anggaran. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Palopo adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kewirausahaan yang

digerakkan melalui pendampingan masyarakat.¹⁰ Persamaan pada penelitian ini dan penelitian peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada peran Dinas Sosial sedangkan penelitian peneliti lakukan akan berfokus pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

- 2) Topan Sanjaya dengan penelitiannya yang berjudul “Strategi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Provinsi Lampung”, 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tahapan formulasi strategi Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui formulasi strategi dengan perencanaan RPJMD dan RKPD melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang, penyusunan rancangan akhir dan penetapan. Kemudian pemerintah menggunakan strategi pengurangan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi jumlah kantong kantong kemiskinan. Namun terdapat kendala dalam proses pengentasan kemiskinan ekstrem diantaranya rendahnya kualitas SDM baik itu pemerintah dan masyarakat, database yang masih belum update, dan jenis strategi yang belum diperbaharui.¹¹ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan 3 strategi untuk mengentaskan masyarakat yang berada didalam kategori miskin

¹⁰ Nuni Nuranisa, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Palopo”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Palopo, 2022), xxii.

¹¹ Topan Sanjaya, “Strategi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Provinsi Lampung”, (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Lampung, 2024), i.

ekstrem, yaitu: a) meminimalkan kantong kemiskinan, b) meningkatkan pendapatan dan c) menurunkan beban pengeluaran. Untuk perbedaannya, yaitu peneliti ini berfokus pada mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung sedangkan penelitian peneliti lakukan berfokus pada hubungan Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Majalengka Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

- 3) Ainil Farhani, dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Pemerintah Kabupaten Dalam Mengatasi Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Bener Meriah”, 2023. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis Strategi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berupa pengumpulan data, observasi, wawancara. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat empat strategi utama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah jalankan, yaitu Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil, dan Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya. Faktor penghambat upaya pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam menangani kemiskinan ekstrem yakni tingkat kesadaran masyarakat akan pendidikan dan perkembangan diri masih sangat rendah sehingga hal tersebut membuat masyarakat selalu berjalan dibawah angka kemiskinan. Faktor penghambat lainnya ialah aspek sosial budaya, dalam konteks ini kesadaran masyarakat akan manfaat jangka panjang dari program pemerintah masih terkendala, menghambat partisipasi mereka dalam upaya-upaya yang ditawarkan.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti

¹² Ainil Farhan, “Strategi Pemerintah Kabupaten Dalam Mengatasi Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Bener Meriah”, (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Pemerintahan, Universitas Islam Negeri A-Raniry Banda Aceh, 2023), 65.

lakukan adalah sama-sama meneliti tentang faktor penghambat upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan ekstrem. Perbedaannya yaitu peneliti ini membahas tentang Strategi Pemerintah Kabupaten Dalam Mengatasi Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Bener Meriah, sedangkan penelitian yang peneliti akan bahas Hubungan Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Majalengka Berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

- 4) Syafira Fadila, dengan penelitiannya yang berjudul “Penanganan Fakir Miskin Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah”, 2022. Adapun tujuan penelitian ini Untuk mengetahui penanganan fakir miskin oleh Dinas Sosial dan Pemakaman di Pekanbaru. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap penanganan fakir miskin oleh Dinas Sosial di Pekanbaru. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode pendekatan kualitatif dan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut bahwa Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 fakir miskin memiliki berbagai macam hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi. Dan Tenaga penanganan fakir miskin dalam Pasal 33 seharusnya memiliki kualifikasi seperti, pendidikan di bidang kesejahteraan sosial, pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial, dan pengalaman melaksanakan pelayanan sosial. Serta Tenaga penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat memperoleh pendidikan, pelatihan, dan penghargaan. Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga, dan juga masyarakat.¹³ Persamaan

¹³ Syafira Fadilla, “Penanganan Fakir Miskin Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah”,

penelitian ini dan penelitian peneliti terdapat dari segi metode penelitian yang bisa dijadikan contoh oleh Peneliti. Perbedaannya penelitian ini membahas tentang Penanganan Fakir Miskin Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasa, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang Hubungan Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Majalengka Berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

- 5) Suprizal R, “Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Desa Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas”, 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Strategi yang digunakan dalam mengatasi kemiskinan di Desa Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas, (2) Dampak dari strategi mengatasi kemiskinan yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian yang terdiri dari perangkat desa Teluk Pulau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan untuk mengatasi kemiskinan adalah pemerintah melakukan koordinasi dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya meningkatkan usaha kerja, masyarakat di ajak untuk bekerja sama dalam meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik.¹⁴ Persamaan dari penelitian ini dan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif, perbedaannya penelitian ini membahas tentang Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Desa Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang Hubungan Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Organisasi Perangkat

(*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 75.

¹⁴ Suprizal R, “Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Desa Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas”, (*Skripsi*, Fakultas Dakwah Dan Dokumentasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), iii.

Daerah (OPD) Kabupaten Majalengka Berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

- 6) Musafra Harahap, dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kota Medan (2023)”, bertujuan untuk mengetahui tingkat kemiskinan di wilayah kota Medan dan bagaimana intervensi dan solusi pemerintah dalam penanganannya. Merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode literatur melalui studi literatur dari jurnal-jurnal dan aplikasi web sepakat Bappenas. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Kota Medan selalu berupaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan secara maksimal; Faktanya, kemiskinan masih menjadi masalah yang parah. Penanggulangan kemiskinan memerlukan keterpaduan berbagai kebijakan dan program pembangunan di berbagai sektor. Cara terbaik untuk memerangi kemiskinan adalah dengan Menyusun Rencana penanggulangan kemiskinan Daerah (RPKD) serta melakukan intervensi sesuai core problemnya, serta mendorong kebijakan yang memperkuat pesan dan posisi ekonomi. Faktor pendorong kemiskinan ekstrem di Kota Medan adalah pembangunan yang tidak merata.¹⁵ Persamaan dari penelitian ini dan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas bagaimana upaya pemerintah dalam penanggulan kemiskinan ekstrem. Perbedaannya yaitu, penelitian ini fokus membahas penanggulangan kemiskinan dari aspek pendidikan, kesehatan, pekerjaan, infrastruktur dan kepemilikan jaminan sosial. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti akan menggunakan program yang ada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 7) Ismatu Maula, dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor Utama Penentu Kemiskinan Ekstrem Di Desa Kaliombo, Sulang, Kabupaten Rembang”, 2023. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor utama

¹⁵ Musafra Harahap, “Analisis Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kota Medan,” *Journal Economy And Currency Study (JECS)* 5: 2 (Juli 2023), 85.

penentu kemiskinan ekstrem di Desa Kaliombo, Sulang Kabupaten Rembang. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner penelitian dengan 100 penduduk Desa Kaliombo sebagai responden. Model analisis yang digunakan yaitu regresi logistik biner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan, pendidikan, kepemilikan aset rumah, kepemilikan aset lainnya dan pandangan hidup berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan ekstrem di Desa Kaliombo, sedangkan pernikahan dini dan status pekerjaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan ekstrem di Desa Kaliombo. Namun, secara simultan, pendapatan, pendidikan, pernikahan dini, status pekerjaan, kepemilikan aset rumah, kepemilikan aset lainnya dan pandangan hidup berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan ekstrem di Desa Kaliombo.¹⁶ Persamaan dari penelitian ini dan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan jenis data kualitatif dalam penelitiannya. Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas dari segi pendapatan, pendidikan, pernikahan dini, status pekerjaan, kepemilikan aset rumah dan lainnya dan pandangan hidup. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan program yang ada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

- 8) Dian Astuti dalam jurnalnya yang berjudul “Strategi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Sulawesi Tengah: Pendekatan Konvergensi dan Inovasi Program”, 2024. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas program pemerintah, termasuk Gercep Gaskan Berdaya dan PADUNGKU, dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Penulis menyimpulkan bahwa peningkatan akses air bersih dan konvergensi program sosial-ekonomi, seperti PANADA dan Gercep Gaskan Berdaya, berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Tengah. Penciptaan lapangan kerja berkelanjutan juga diperlukan. Inovasi program

¹⁶ Ismatu Maula, “Faktor Utama Penentu Kemiskinan Ekstrem Di Desa Kaliombo, Sulang Kabupaten Rembang”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, 2023), vii.

melalui pemberdayaan ekonomi terbukti efektif. Program seperti Gercep Gaskan Berdaya dan PADUNGKU berhasil menurunkan kemiskinan, dengan penurunan total sebesar 0,64% pada periode 2023-2024. Tantangan terbesar dalam pelaksanaan program adalah aksesibilitas di daerah terpencil, yang menghambat distribusi bantuan secara merata.¹⁷ Persamaan dari penelitian ini dan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif. Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan variabel independen antara lain: akses terhadap air bersih, penduduk tidak bekerja, penerima bantuan PANADA dan penduduk tidak bersekolah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti membahas Hubungan Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Majalengka Berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

- 9) Eka Nurcahya dan Mohammad Benny Alexandri dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis SWOT Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bandung”, 2022. Penulis menyimpulkan bahwa pemerintah Pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan berbagai program, misalnya bidang pendidikan, pekerjaan, layanan perumahan, partisipasi masyarakat. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) telah menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun Peraturan Daerah (PERDA), aplikasinya perlu pengawasan dan disusun program yang lebih praktis. Persamaan dari penelitian ini dan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang kemiskinan. Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas program dari bidang pendidikan, pekerjaan, layanan perumahan, partisipasi masyarakat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti membahas program dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

¹⁷ Dian Astuti, “Strategi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Sulawesi Tengah: Pendekatan Konvergensi dan Inovasi Program, ”*SASMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)* 3: 3 (September 2024): 362-363.

Pertanahan dan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

- 10) Romi Saputra dengan penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan”, 2023. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Efektivitas pelaksanaan Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Tanjung gading secara umum sudah efektif yang dilihat dari ketercapaian tujuan program, peningkatan pendapatan, dan mampu mengatasi masalah peningkatan keberfungsian sosial anggota, akan tetapi ada program yang belum dapat tercapai sesuai dengan tujuan yaitu mengenai keberlangsungan program terutama dalam penambahan modal usaha. Persamaan dari penelitian ini dan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas efektifitas pelaksanaan program, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti membahas efektivitas hubungan kerja antara Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Organisasi Perangkat Daerah di kabupaten Majalengka.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.¹⁸ Kerangka berpikir berfungsi sebagai peta konseptual yang menggambarkan hubungan logis antara variabel-variabel penelitian, teori yang mendasarinya, dan hipotesis yang diajukan. Kerangka berpikir juga membantu peneliti dan pembaca untuk memahami alur pemikiran dan landasan teoritis dari penelitian yang dilakukan.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah wadah koordinasi lintas sektor di wilayah provinsi maupun kabupaten/kota, yang

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 20.

bertugas merumuskan dan mengimplementasikan strategi serta program untuk mengurangi kemiskinan secara efektif. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Penanggulangan kemiskinan dipandang sebagai tanggungjawab bersama yang memerlukan kolaborasi efektif dan kreatif dari seluruh pemangku kepentingan.

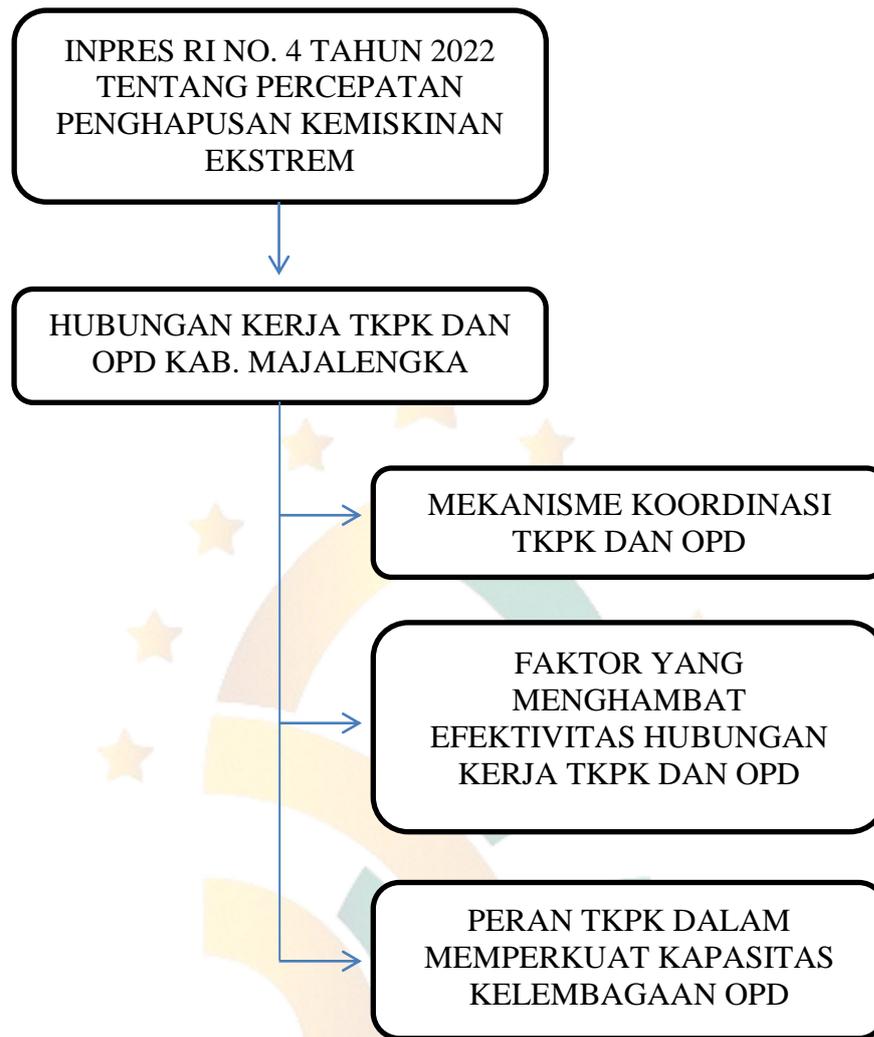
Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021, struktur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Majalengka terdiri dari berbagai dinas dan badan yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi tertentu. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka merupakan struktur pemerintahan yang bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik ditingkat kabupaten. Organisasi Perangkat Daerah berfungsi untuk mendukung pencapaian dan misi pemerintahan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Melalui Inpres ini, pemerintah mengarahkan seluruh pihak terkait untuk memperkuat pelaksanaan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Instruksi ini juga menekankan pentingnya pemanfaatan data yang akurat dan terkini sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program, sehingga intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan efektif.

Berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan (George C. Edward III), keberhasilan implementasi Inpres No. 4 Tahun 2022 sangat bergantung pada kemampuan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagai koordinator lintas sektor untuk mengintegrasikan program-program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan berperan sebagai aktor utama yang mengelola komunikasi, koordinasi, dan

kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah sehingga kebijakan dapat diterjemahkan ke dalam tindakan nyata yang terukur dan tepat sasaran. Organisasi Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana teknis memiliki tanggung jawab operasional dalam menjalankan program-program yang mendukung tujuan Inpres tersebut. Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang jelas dan fungsi yang terdefinisi dengan baik memungkinkan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing.

Edward juga menekankan pentingnya sumber daya, komunikasi, dan kepemimpinan dalam proses implementasi. Dalam hal ini, Inpres No. 4 Tahun 2022 menyediakan kerangka kebijakan dan arahan yang jelas, sementara Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Organisasi Perangkat Daerah harus memastikan tersedianya sumber daya manusia, anggaran, serta mekanisme komunikasi yang efektif untuk mengatasi hambatan implementasi.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian.¹⁹ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan dan persepsi.²⁰ Metode kualitatif umumnya menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam,

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 2.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 11.

observasi partisipan, analisis dokumen, dan fokus grup diskusi. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dan interpretatif, dengan tujuan untuk menghasilkan pemahaman yang kaya dan mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Fokus dari penelitian ini adalah Hubungan Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Majalengka Berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian ditentukan berdasarkan tingkat kebaruan informasi yang diperoleh dari situasi sosial dilapangan. Fokus penelitian ini memiliki peran penting dalam menentukan batasan dan ruang lingkup penelitian. Selain itu, fokus juga berfungsi sebagai panduan untuk mengarahkan jalannya penelitian.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²¹ Penelitian ini disebut penelitian empiris karena peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui Hubungan Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Majalengka Berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), merupakan metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data secara langsung dilokasi atau lingkungan alami tempat fenomena yang diteliti terjadi. Pada umumnya melibatkan teknik pengumpulan

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

data seperti observasi partisipan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen atau artefak yang relevan dengan konteks penelitian. Penelitian lapangan ini akan dilakukan pada Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan, dan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yang dijadikan sebagai acuan utama peneliti dalam penelitian ini. Data ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara pada:

- 1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Majalengka
- 2) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan
- 3) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Majalengka, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh seperti dari penelitian terdahulu, skripsi, jurnal, buku, dan sumber tambahan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Yaitu pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Observasi ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung mengenai

beberapa bentuk kegiatan serta pelaksanaan program-program dilokasi penelitian. Hal ini sangat penting karena dalam pengumpulan data metode pengamatan ini diharapkan dapat mengungkapkan motif-motif perilaku, kebiasaan, serta hubungan antar individu. Observasi ini akan dilakukan pada Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Majalengka, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan, dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Majalengka.

b. Wawancara

Percakapan yang dilakukan dua pihak yaitu pihak yang mengajukan pertanyaan dan informan yang dilakukan dengan maksud tertentu.²² Peneliti akan melakukan wawancara dengan Kepala Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Majalengka, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Majalengka, dan masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.

c. Dokumentasi

Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang misalnya bisa catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan.²³ Dokumentasi ini bisa berisi berupa laporan tahunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan data kemiskinan ekstrem di Kabupaten Majalengka.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mengorganisir, menganalisis dan menafsirkan data yang ditelaah dikumpulkan. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif dalam bentuk kata-kata atau ucapan dari perilaku orang-orang

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 309.

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 329.

yang diamati dalam penelitian ini, sedangkan bahan tambahan adalah non manusia. Milles dan Huberman dalam mengemukakan bahwa pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data yang digunakan mencakup tiga kegiatan yaitu sebagai berikut:²⁴

a. Reduksi Data

Pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dilapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak perlu dan menorganisasi data yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik. Reduksi data bisa dilakukan dengan mengelompokkan ata berdasarkan tema.

b. Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang tersusun memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian, dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang dilakukan lebih jauh, menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang diperoleh dari penyajian. Data ini bisa disajikan dalam bentuk tabel, narasi atau diagram.

c. Penarik Kesimpulan

Kegiatan konfigurasi yang utuh. Tahap ini penelitian mencari makna dari data yang diperoleh dengan jalan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, dan hal-hal yang sering muncul ke dalam satu kesatuan informasi yang mudah dipahami, ditafsirkan dan dikategorikan sesuai dengan masalahnya. Dari data atau informasi yang didapatnya mencoba mengambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Penarik kesimpulan berisi evaluasi berdasarkan indikator keberhasilan.

²⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 209-210.

6. Lokasi Penelitian

- a. Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Majalengka / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka di Jl. Siti Armilah No. 64, Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka.
- b. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan di Jl. K. H. Abdul Halim No. 69, Munjul, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka.
- c. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Jl. Suma No. 422, Babakan Jawa, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka.

H. Sistematika Penulisan

Tujuan dari dibuatnya sistematika penulisan adalah untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi. Dengan itu peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab Pertama, Pendahuluan

Dalam pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah (identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah), tujuan dan manfaat penelitian, literatur review/penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab Kedua, Landasan Pustaka Dan Teori

Landasan Pustaka menguraikan tentang konsep kemiskinan ekstrem (definisi kemiskinan ekstrem, indikator kemiskinan ekstrem, dampak kemiskinan ekstrm), peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan hubungan kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Landasan Teori Penelitian menguraikan tentang Teori Implementasi Kebijakan (Teori George C. Edwards III), Teori Jaringan Kebijakan Publik dan Teori Efektivitas Hukum.

3. Bab Ketiga, Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berisi tentang gambaran Kabupaten Majalengka, profil Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), profil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan, dan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan kondisi kemiskinan di Kabupaten Majalengka.

4. Bab Keempat, Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berisi pembahasan tentang bagaimana mekanisme koordinasi yang diterapkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Majalengka, apa saja faktor yang menghambat efektivitas hubungan kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Majalengka, dan bagaimana peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Mjaalengka.

5. Bab Kelima, Penutup

Berisi kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.